

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Etnis Wa merupakan salah satu etnis minoritas terbesar di Myanmar yang tinggal dikawasan administratif Shan dengan total sekitar 800.000 penduduk (Kuppuswamy, 2013). Selain itu masih terdapat 6 etnis minoritas terbesar yang menetap di wilayah kekuasaannya masing masing seperti Chin, Kachin, Karenni, Karen, Mon, Rakhine (Oxford Burma Alliances, 2017). Terdapat total 1 juta etnis Wa di dunia, setengah dari mereka hidup di Myanmar dan setengahnya lagi berada di daratan China (The Peoples of The World Foundation, 2005). Pada awalnya di tahun 1989, etnis Wa membentuk sebuah partai bernama United Wa State Party (UWSP) sebagai bagian dari *Communist Party of Burma* (CPB) dan UWSA dipergunakan menjadi kekuatan militernya (Simms, 2017). Setelah CPB runtuh pada Maret 1989, etnis Wa bangkit mengambil alih markas di Panghsang perbatasan China, menjadi kekuatan baru bagi komunis Burma (Pike, 2015). Kebangkitan etnis Wa ini memberikan warna baru bagi keamanan Myanmar, dimana hingga tahun 2017, rasa aman masih belum juga dapat diraih sepenuhnya oleh masyarakat Myanmar.

Berbicara mengenai keamanan, tentu erat kaitannya dengan aksi teror, konflik sipil, bersenjata dan lain sebagainya. Salah satu isu yang menarik dan akan menjadi bahasan utama disini adalah krisis keamanan Myanmar yang disebabkan oleh konflik etnis berkepanjangan. Konflik antar etnis memang telah menggoreskan

sejarah panjang bagi negara yang baru saja menganut demokrasi tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang dianggap wajar karena disebabkan berkaitan dengan banyaknya jumlah etnis yang menetap di dalam teritorial Myanmar. Lebih dari 135 etnis berbeda tinggal bersama di dalam satu kawasan dan membawa budayanya masing-masing. Burman sebagai etnis terbesar yang mencakup dua pertiga populasi, memiliki kedudukan yang cukup tinggi dengan menguasai militer dan pemerintahan (Oxford Burma Alliances, 2017). Tidak jarang, Burman sering menjadi api pertama dalam konflik antar etnis yang saat ini terjadi di Myanmar.

135 etnis lainnya atau satu pertiga masyarakat Myanmar hidup di daerah perbatasan dan pegunungan Myanmar. Mereka sering menjadi korban dari kejahatan perang antara militer Myanmar dan kelompok etnis bersenjata di kawasan Kachin dan utara Shan (Amnesty Internasional, 2017). Namun permasalahan disana tidak sesederhana militer Myanmar berperang dalam upaya meredakan aksi pemberontakan etnis-etnis yang melawan kebijakan pemerintah, sementara etnis berperang dalam memperjuangkan tujuan dan tuntutan, tidak jarang pula antar etnis minoritas berperang satu sama lain seperti suku Karen dan Mon (Wilson, 2006). Hal ini sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Myanmar dari Inggris hingga saat ini, menjadi konflik yang berkepanjangan yang secara tidak langsung memaksa etnis-etnis di Myanmar untuk memiliki pertahanan senjata yang cukup kuat guna berjaga-jaga apabila mendapat serangan di waktu yang tidak terprediksi. Salah satu etnis minoritas yang terlibat di dalamnya adalah *United Wa State Army* (UWSA). UWSA merupakan salah satu etnis yang terkenal diantara etnis minoritas Myanmar

lainnya. Ia merupakan pimpinan tentara narkotika pemberontak terbesar di kawasan tersebut (Pagnucco & Peters, 2015).

Terdapat suatu keunikan tersendiri apabila berbicara mengenai UWSA. Sebagai etnis bersenjata, ia merupakan salah satu etnis yang sangat minim terlibat dalam konflik baik itu antar etnis maupun dengan militer pemerintahan Myanmar. Walaupun begitu, UWSA tetap menjadi etnis bersenjata terbesar di seluruh Myanmar, dengan total 20.000-30.000 tentara dan 10.000 anggota lain diluar kemiliteran (Kuppuswamy, 2013). Kehidupan UWSA yang begitu damai sebagai kelompok etnis bersenjata ini didasari oleh adanya perjanjian damai Panglong pada 12 Februari 1947. Dimana perjanjian tersebut merupakan titik pertama inisiasi federalisme oleh Jenderal Aung San. Di dalam perjanjian dikatakan bahwa otonomi internal dalam administrasi di daerah perbatasan diberikan secara penuh pada pihak yang menandatangani, dimana salah satunya adalah UWSA (Lynn, 2017). Bahkan hal ini diperkuat dengan dituliskannya wilayah administrasi yang diberikan pada UWSA secara sah di dalam konstitusi 2008 Myanmar, dimana terdiri dari kota Hopang, Mongmau, Panwai, Nahpah, Metman dan Panghsang (Pangkham) dalam *Shan State* (Myanmar Peace Monitor, 2017). Sejak saat itu, intensitas keterlibatan etnis Wa dalam setiap konflik sipil di Myanmar cenderung menurun bahkan nihil. Pada tahun 2011, UWSA memperbaharui perjanjian gencatan senjatanya di Naypyidaw (Gunaratna & Kam, 2016, hal. 167). Bagi mereka, daripada berkebut dalam perang yang merugikan, UWSA memiliki prioritas sendiri mengenai pembangunan di dalam negara Wa (Kramer, 2007). Pilihan mereka untuk selalu menjaga posisi yang menguntungkan, baik dengan pilihan tempat tinggal, aktivitas,

dsb sempat membuat negara Wa dikatakan sebagai salah satu tempat paling tersembunyi di bumi, dimana tidak satupun orang boleh masuk karena adanya anggapan bahwa orang luar merupakan mata-mata (BBC, 2016).

Di lingkup internasional, UWSA atau etnis Wa pada khususnya cukup terkenal dengan sebutan “*the darling of international drug syndicates*” karena produksinya yang melimpah dibidang narkotika dan obat terlarang (The Star, 2017). Bahkan pada bulan Mei 2013, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan UWSA sebagai salah satu organisasi perdagangan narkotika (Kuppuswamy, 2013). Sementara itu di lingkup nasional, UWSA sering dipandang sebagai sosok pemimpin. UWSA sering mengadakan pertemuan antar etnis dan menjadi jembatan untuk berdialog dengan pemerintah. Bahkan, UWSA dianggap memiliki kesetaraan dengan UNFC (*United Nationalities Federal Council*), kelompok aliansi bagi etnis-etnis oposisi Myanmar (Sun, 2017). Merespon hal tersebut, pada tahun 2011, Myanmar, negara yang hingga kini terkenal akan perang sipil internalnya, mengeluarkan pengumuman terkait NCA (*Nationwide Ceasefire Agreement*) dengan harapan mengakhiri ketegangan etnis yang telah terjadi selama 60 tahun (Myint, 2015). Namun rupanya usaha Myanmar tersebut belum membuahkan hasil yang berarti. Terdapat beberapa kelompok etnis yang menolak menandatangani NCA tersebut, diantaranya Kachin Independence Organization (KIO) , Shan State Army – North (SSA – N), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), Ta’ang National Liberation Army (TNLA) dan UWSA. Kelompok etnis tersebut menolak NCA karena sifatnya yang tidak nasional dengan

mengesampingkan etnis-etnis kecil dan menawarkan alternatif lain untuk meraih perdamaian (Radio Free Asia, 2017).

Alternatif lain tersebut disampaikan oleh badan khusus yakni Union Political Negotiation Dialogue Committee (UPNDC) pada pertemuan kedua Konferensi Panglong sebagai lanjutan dari NCA (Phyo & Mang, 2017). Pemerintah Myanmar merespon hal ini dengan netral tetapi tegas. NCA memang tidak bisa diubah atau diamandemen, tetapi dialog politik dapat dibahas lebih lanjut. Keputusan pemerintah Myanmar ini dipengaruhi oleh upaya negosiasi yang dilakukan oleh China. Sun Guoxiang, wakil China untuk hubungan Asia meminta pemerintah Myanmar untuk bersedia menerima kehadiran kelompok etnis tersebut dalam Konferensi kedua Panglong tepat satu hari sebelum acara tersebut dimulai (Phyo & Mang, 2017).

China dalam permasalahan etnis di Myanmar memang memiliki peran yang cukup aktif. Bahkan China mengeluarkan kebijakan resmi untuk merespon agenda perdamaian di Myanmar yakni dengan “*persuading for peace and facilitating dialogue*” (Sun, 2017). Hal ini sering dikaitkan dengan rumor kedekatan hubungan antara China dengan kelompok etnis UWSA. UWSA sering terlihat lebih condong ke China daripada ke Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan tanda jalan, toko dan bangunan di negara bagian Wa ditulis dalam bahasa mandarin, bisnis dan mata uang China tersebar dan menjadi pemandangan biasa setiap hari, bahkan bahasa percakapan pun mayoritas menggunakan bahasa mandarin (Reuters, 2016). Corak kehidupan China yang terjadi dalam UWSA ini bukanlah hal yang tergolong baru terjadi. Menurut catatan sejarah, China telah menjalin hubungan yang cukup lama

dengan UWSA, sehingga bantuan mengalir dalam bentuk ekonomi dan militer (Kuppuswamy, 2013). Hubungan ini telah dimulai sejak era dimana komunis menguasai Myanmar. Sebagai bagian dari CPB, etnis Wa dirasa memiliki hubungan erat dengan China (Kramer, 2007), terlebih keberadaan etnis Wa yang sebagian besar berada di daratan China juga turut menjadi aspek penting dalam hubungan China dan UWSA. Diantara semua kelompok etnis di Myanmar, UWSA mungkin memiliki hubungan terdekat dan memunculkan simpati terbanyak dari China (Sun, 2017). Di dalam skripsi ini penulis akan mencoba menganalisa mengapa China memilih untuk bersikap proaktif dalam perdamaian etnis United Wa State Army di Myanmar. Berbagai sejarah, situasi dan keadaan yang ada mulai dari awal hingga saat ini telah penulis sampaikan dan akan menjadi bahan analisa apakah pengaruh yang diberikan China ini berbuah positif atau negatif bagi pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam permasalahan ini. Penulis juga akan mencoba menganalisa sejauh mana dan berbentuk apa upaya yang dilakukan oleh China dalam permasalahan etnis di Myanmar. Perdamaian etnis di Myanmar hingga tahun November 2017 ini memang belum memiliki titik akhir, maka penulis akan memberikan batasan-batasan dalam hal penulisan skripsi ini yang akan dibahas pada jangkauan penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pengaruh China dalam mendukung agenda perdamaian etnis United Wa State Army di Myanmar?

C. LANDASAN TEORI

- Economy - Security Nexus

Economy - Security Nexus sekilas terlihat seperti cabang dari paradigma liberalisme. Di dalam paradigma tersebut dijelaskan bahwa *the peaceful effect of trade is the second pillar of liberalism* (Cavelty & Balzacq, 2017). Secara lebih lanjut, dalam liberalisme, adanya kepentingan atau ketergantungan ekonomi antar negara atau aktor tertentu akan membawa kedamaian karena aktor tersebut menjadi memiliki kecenderungan untuk menjaga situasi agar selalu damai. Kecenderungan untuk selalu menjaga kondisi damai tersebut didasari oleh adanya perhitungan untung dan rugi. Apabila negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dan terjadi konflik, maka yang terjadi adalah hilangnya devisa dan ancaman defisit pada aktor yang bersangkutan.

Economy – Security Nexus merupakan konsep yang hampir serupa dengan paradigma liberalisme diatas. Namun, Economy – Security Nexus lebih menggambarkan tentang hubungan yang kompleks antara ekonomi dan keamanan. Menggambarkan bagaimana ekonomi dan keamanan berinteraksi satu sama lain dan seberapa besar pengaruh ketergantungan ekonomi mempengaruhi aspek keamanan. Konsep ini menekankan bahwa kedekatan hubungan ekonomi dapat meningkatkan atau mengurangi keamanan suatu bangsa (Pempel, 2013). Jika dalam liberalisme ketergantungan ekonomi dipastikan akan membawa kedamaian, Economy-Security Nexus menyediakan banyak opsi lain, bukan hanya positif tetapi

juga negatif, sebagai dampak dari ketergantungan ekonomi. Di dalam skripsi ini, Economy-Security Nexus akan digunakan untuk menganalisa secara spesifik hubungan antara China dan UWSA dimana terdapat 2 aspek kepentingan yang membentuk simbiosis yang sama yakni mutualisme, namun dalam hubungan yang berbeda. Variable kedua kepentingan tersebut adalah ekonomi dan keamanan. Melalui konsep ini, ketergantungan ekonomi berasal dari hubungan China dan UWSA yang selama ini saling mengekspor dan memperjual belikan baik barang maupun jasa, sementara keamanan berasal dari hubungan antara China dan Myanmar.

Ketergantungan ekonomi antara China dan UWSA akan dianalisa lebih lanjut terkait intensitasnya, dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi hubungan China dan Myanmar. Selanjutnya melalui konsep ini juga akan dijelaskan dampak dari hubungan ketergantungan ekonomi antara China dan UWSA tersebut merujuk pada hal yang positif atau negatif, karena sesuai dengan pembahasan sebelumnya, di dalam konsep Economy-Security Nexus menawarkan banyak opsi sebagai dampak dari hubungan ekonomi, lain halnya dengan prinsip liberalisme.

- Teori Stabilitas Hegemonik

Teori stabilitas hegemonik telah menjadi penjelasan umum yang sering digunakan untuk memahami dinamika ekonomi di lingkup internasional. Dengan menghubungkan struktur dan evolusi ekonomi dengan distribusi kekuasaan internasional, teori ini menggabungkan faktor politik dan hasil ekonomi untuk

meneliti lebih lanjut kebutuhan ekonomi politik dunia (Grunberg, 1990). Pemikiran dasar mengenai teori ini pada awalnya diusung oleh Charles P. Kindleberger pada tahun 1973, yang mana dilanjutkan dan dilabeli oleh Robert O. Keohane (Gowa, 1989). Teori ini dianggap penting dan sangat efektif apabila hendak menganalisa mengenai kestabilan dan ketidakstabilan dalam dunia ekonomi politik. Secara lebih lanjut dijelaskan, teori stabilitas hegemonik menekankan bahwa peran dari kekuatan hegemoni akan menentukan hubungan pembangunan ekonomi serta stabilitas politik didalam struktur internasional (Yazid, 2015). Menurut Robert Keohane (Keohane, 2005):

“to be considered hegemonic in the world political economy...a country must have access to crucial raw materials, control major sources of capital, control over market and competitive advantages in the production of highly valued goods”

Prinsip kekuatan ekonomi memang menjadi ciri khas utama dalam teori ini, dimana ekonomi dianggap sebagai pendukung utama untuk setiap kriteria hegemoni secara umum seperti kekuatan militer, teknologi bahkan aliansi politik. Sebagai contoh apabila suatu negara kuat dalam hal ekonominya, tentu saja ia akan cenderung muda untuk membeli senjata kemiliteran untuk memperkuat aspek militer, dan bahkan aliansi politik erat antar dapat diraih dengan lebih mudah apabila negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi tersebut dapat menarik negara lain untuk menjalin hubungan kerjasama yang sifatnya cenderung akan sama-sama menguntungkan (mutualisme).

Di dalam teori ini terdapat suatu jaminan bahwa stabilitas hanya bisa diciptakan oleh negara atau aktor yang mempunyai kekuatan hegemoni. Jaminan ini hadir karena adanya rasa percaya bahwa pemilik kekuatan hegemoni merupakan yang terkuat dan terbaik diantara yang lainnya, sehingga ia memiliki keuntungan lebih yang didapat secara tidak langsung yakni, menentukan stabilitas struktur internasional.

Di dalam skripsi ini, teori stabilitas hegemonik akan digunakan untuk menganalisa apakah China berhasil dalam upayanya mendukung perdamaian etnis Myanmar. China seperti kita ketahui merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi jauh diatas negara-negara lainnya. Pada awalnya sesuai dengan kerangka teori, China akan dianalisa apakah sesuai dengan karakteristik aktor kekuatan hegemoni diatas dan apakah China dapat berhasil menjadi penentu stabilitas dalam kehidupan ekonomi politik dunia. Hal ini pun peneliti rasa dapat menjawab dampak kepemilikan kekuatan hegemoni China terhadap kawasan disekitarnya. Merujuk pada upayanya mendukung perdamaian etnis di Myanmar.

D. ARGUMEN PENELITIAN

- Melalui metode analisa economy-security nexus, tulisan ini berargumen bahwa bantuan China terhadap UWSA memiliki tujuan untuk membuat UWSA lebih kooperatif dalam menanggapi upaya perdamaian yang tengah dilakukan dan secara tidak langsung akan berimbas pada hubungan keamanan China-Myanmar.

- Melalui metode analisa teori stabilitas hegemonik, tulisan ini berargumen bahwa China sebagai salah satu pemilik kekuatan hegemoni memiliki kewajiban tidak langsung untuk menjamin stabilitas di kawasannya. Berkaitan dengan upaya rekonsiliasi etnis di Myanmar, keberadaan China dianggap akan membawa hasil yang positif karena China dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya, terutama di bidang ekonomi untuk berperan aktif mendukung dan membantu proses berjalannya rekonsiliasi tersebut.

E. TUJUAN PENULISAN

1. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa lebih lanjut latar belakang, kepentingan atau tujuan apa yang dimiliki oleh China dalam keputusannya untuk mendukung perdamaian kelompok etnis bersenjata UWSA di Myanmar.
2. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana China memberikan pengaruhnya dalam upaya perdamaian serta dampak apa saja yang ditimbulkan dengan keputusan China untuk mendukung perdamaian kelompok etnis bersenjata UWSA di Myanmar.
3. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh China dalam usahanya mendukung perdamaian etnis UWSA di Myanmar hingga pada pertengahan tahun 2017. Bentuk – bentuk keterlibatan China dalam mengambil keputusan membantu kelompok etnis bersenjata UWSA akan menjadi pusat analisa dari tulisan ini. Selanjutnya latar belakang dan dampak akan menjadi faktor penguat bagi analisa yang ada.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif. Adapun metode kualitatif disini akan berupa analisa fenomena hubungan, baik internasional antara Myanmar dan China ataupun transnasional antara China dan kelompok etnis bersenjata UWSA yang didapat dari hasil pengelompokan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sekunder yaitu melalui publikasi tertulis baik buku, jurnal maupun artikel, dan juga internet atau media lainnya, termasuk persyaratan yang perlu dipenuhi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas bahasan pada karya tulis ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang UWSA sebagai salah satu etnis bersenjata di Myanmar, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang perjalanan konflik etnis di Myanmar yang melibatkan UWSA mulai dari penyebab hingga penyelesaian terbaru, serta keterlibatan China dalam upaya tersebut.

Bab III membahas tentang hubungan antara dua aktor yakni China dan Myanmar, dimana UWSA digunakan sebagai media/ perantara pembuka jalan bagi keterlibatan China di dalam upaya perdamaian Myanmar. Menjelaskan pengaruh China secara keseluruhan baik itu Myanmar maupun UWSA dan secara lebih lanjut membahas hubungan dan kepentingan ketiga aktor yang berkait, dimana antara UWSA dan China terdapat kepentingan ekonomi yang secara tidak langsung berimbas positif bagi Myanmar karena membantu menciptakan perdamaian untuk konflik etnis yang telah berlangsung cukup lama.

BAB IV membahas tentang kekuatan hegemoni yang ingin China buktikan pada dunia Internasional. Bahwa dengan memiliki kekuatan hegemoni, jaminan stabilitas akan lebih mudah diraih oleh negara-negara di kawasan sekitarnya. Bab ini juga akan menjelaskan apakah jaminan stabilitas yang ditawarkan oleh China sebagai pemilik kekuatan hegemoni tersebut akan berjalan baik atau tidak.

Bab V berisi rangkuman dari keseluruhan bab yang disusun dalam bentuk kesimpulan dan menjadi penutup dalam karya tulis ini.

